

Strategi Perguruan Tinggi dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Maryadi
Wahyu Widodo

Abstract: *The globalization are demands the increasing quality of the human resources so that they are able to play an active and productive role by taking the education in all fields and levels into the first priority. The high learning institution as an institution which develops vision and mission to promote the human resources qualities has the main role and strategic position. The logical consequence of this is that university must be able to carry out and to complete that vision and mission successfully, so that the quality of the human resources can increase significantly which is in accordance with the demand and development of the era, which can accommodate the local initiatives, national interest and global function.*

Kata-kata kunci : Era Global, Partisipasi Pendidikan, Kebijakan, Strategi.

Semakin pesatnya kemajuan teknologi komunikasi (yang hampir tak terbendung lagi) membuat dunia semakin "nampak sempit". Hal ini memacu perkembangan dunia kearah globalisasi yang menerpa semua aspek kehidupan : baik aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan bahkan aspek ideologi. Kesemuanya aspek kehidupan tersebut saling berkaitan dan menyebar kesegala arah. Hal ini dikarenakan batasan antara negara yang satu dengan yang lainnya semakin kabur. Era globalisasi membuat hubungan antara negara yang satu dengan yang lainnya akan semakin *instan* dan transparan. Kondisi ini akan berakibat secara langsung terhadap terjadinya persaingan yang semakin ketat (*rigid*) di berbagai bidang kehidupan.

Maryadi dan Wahyu Widodo adalah dosen IKIP PGRI Semarang

Untuk menyongsong era globalisasi tersebut, maka secara mutlak dipersyaratkan suatu kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang baik, sehingga mampu berperan secara aktif dan produktif. Dengan demikian, kata kunci yang paling tepat dalam menyongsong era globalisasi adalah kualitas SDM. Pada lingkup mikro, jika kualitas SDM rendah maka akan berpengaruh negatif terhadap produktivitas, demikian halnya sebaliknya, jika kualitas SDM tinggi akan berimplikasi terhadap produktivitas yang tinggi pula. Hipotesis ini secara empiris dapat dilihat dari adanya *productivity gap* antara negara-negara maju.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, tentu saja memiliki konsekuensi logis untuk memberikan prioritas utama dalam hal upaya-upaya peningkatan kualitas SDM. Agar supaya tidak tertinggal oleh negara-negara lain, maka pelaksanaan berbagai kebijakan, program, dan aktivitas untuk meningkatkan SDM tersebut tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Paling tidak terdapat dua indikator utama untuk mengukur kualitas SDM suatu negara, yakni : indikator pendidikan dan indikator kesehatan. Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM, pemerintah telah menempuh berbagai upaya. Di bidang kesehatan misalnya: dengan mendirikan Puskesmas yang tersebar di hampir semua kecamatan di wilayah RI. Hal ini ditempuh sebagai upaya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan murah kepada masyarakat. Demikian halnya di bidang pendidikan, pemerintah telah mencanangkan program WAJAR (Wajib Belajar) sembilan tahun. Upaya di bidang pendidikan ini tidak lain adalah untuk memacu angka partisipasi pendidikan disemua tingkat, dimulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Bahwa pendidikan merupakan salah satu indikator penting (utama) dalam upaya meningkatkan kualitas SDM.

Bertolak dari uraian tersebut, maka dapat dikemukakan di sini bahwa kata kunci untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Tulisan ini tidak lebih memfokuskan kepada bidang pendidikan, khususnya peran dan strategi perguruan tinggi. (PT) dalam menyongsong era globalisasi. Agar pembahasan dapat lebih kompetitif, maka secara berurutan akan diulas: (a) fungsi dasar pendidikan nasional, (b) angka partisipasi (SER) pendidikan tinggi, dan (c) kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan.

FUNGSI DASAR PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL

Paling tidak terdapat tiga fungsi dasar sistem pendidikan nasional (Wardiman, 1995: 11-12), yakni : (1) Mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) mempersiapkan tenaga kerja trampil dan ahli, serta (3) membina dan mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Pertama, fungsi pendidikan dalam mencerdaskan bangsa merupakan amanat yang telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam rangka mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, fungsi pendidikan tercermin di dalam pasal 31. Bunyi pasal tersebut merupakan landasan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk mencanangkan program wajib belajar (WAJAR) Pendidikan Dasar 9 tahun. Program WAJAR tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, paling tidak pendidikan sekolah dasar (SD) selama 6 tahun dan pendidikan pada SLTP selama 3 tahun.

Kedua, fungsi pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja terdidik, terampil dan terlatih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja terdiri dari berbagai jalur (sekolah dan luar sekolah), jenis keahlian (menurut cabang keahlian), jenjang sekolah kerja harus lentur dan selalu berwawasan lingkungan, agar pendidikan keahlian dan keterampilan dapat selalu disesuaikan dengan kebutuhan akan jenis-jenis keterampilan dan keahlian profesi yang senantiasa berubah seiring dengan perkembangan jaman.

Ketiga, fungsi pendidikan sebagai sarana untuk menyiapkan penguasaan Iptek. Cakupan dari berbagai sistem ini, ialah semua program pendidikan yang berorientasi pada pengembangan Iptek pada setiap jenjang pendidikan. Program pendidikan yang berorientasi pada pengembangan Iptek, paling tidak harus memiliki : (a) sifat elitis, yakni memilih peserta didik yang berbakat istimewa dan berprestasi luar biasa, (b) namun tetap memiliki ideologi kerakyatan, yakni peserta didik tanpa membedakan SARA harus memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih.

ANGKA PARTISIPASI (SER) PENDIDIKAN TINGGI

Hasil observasi (Nachrowi, 1995: 233) menunjukkan bahwa terdapat transisi ekonomi yang terjadi secara global di beberapa negara, terutama di negara industri baru (NICs) dan negara-negara berkembang. Banyak negara yang ekonominya tumbuh secara pesat, sehingga secara rata-rata pendapatan perkeluarganya makin tinggi. Akibatnya kemampuan keluarga yang semakin kuat (secara ekonomi) maka permintaan akan pendidikan (pada semua jenjang) dapat dilihat dari tinggi rendahnya angka *School Enrollment Ratio* (SER), yakni ratio antara anak yang tercatat disuatu tingkat pendidikan dengan anak usia sekolah dalam tingkat pendidikan tersebut. Apalagi negara tersebut sadar akan pentingnya investasi dalam pendidikan untuk menghadapi persaingan di tingkat yang makin global. Oleh karena itu investasi pada sektor ini sangat diprioritaskan.

Data empiris menunjukkan bahwa investasi pendidikan sebagai inti pengembangan kualitas SDM terbukti memilik sumbangan yang sangat signifikan terhadap tingkat keuntungan ekonomi (*rate of return*) yang tinggi (Mc Machon & Boediono, 1992). Hasil penelitian *Psacharopoulos* (1993) yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa investasi pendidikan menunjukkan tingkat keuntungan yang cukup tinggi, yakni menunjukkan angka rata-rata 18,4%, 13,1%, dan 10,9% (*social rate of return*) serta 29,1%, 18,1% dan 20,3% (*private rate of return*) masing-masing untuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata investasi pendidikan memberikan manfaat untuk keuntungan ekonomi yang cukup tinggi baik bagi peserta didik maupun masyarakat pada umumnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa program pendidikan pada umumnya merupakan investasi yang cukup menguntungkan secara ekonomi. Tingkat keuntungan ekonomi bagi pribadi peserta didik ternyata secara konsisten jauh lebih tinggi daripada keuntungan sosial secara umum karena adanya subsidi pemerintah yang cukup tinggi terhadap biaya pendidikan. Implikasinya ialah bahwa pemerintah harus terus menerus meyakinkan dan didorong untuk meningkatkan anggaran belanja untuk membiayai pembangunan di bidang pendidikan (dalam Wardiman, 1995: 12).

Berkaitan dengan kondisi ekonomi dan SER pendidikan tinggi ternyata terdapat hubungan yang signifikan (Nachrowi, 1995: 235-245). Dari sisi pemerintahan secara mikro maupun makro, kebutuhan akan pendidikan

tinggi makin meningkat. Hal ini ditunjang oleh fakta berikut yang menunjukkan bahwa memang terjadi peningkatan SER pendidikan tinggi secara global. Amerika Serikat dan Jepang yang oleh Bank Dunia kondisinya dikelompokkan dalam *high-income economy* ternyata mempunyai SER yang cukup tinggi, yaitu masing-masing 60% dan 30%. Sedangkan Indonesia yang kondisi ekonomi dikelompokkan kedalam *low-income economy*, hanya memiliki SER 7%. Sementara Korea Selatan yang status ekonominya dikelompokkan kedalam *upper-income economy* angka SER pendidikan tinggi terletak diantara AS (tertinggi) dan Indonesia (terendah) yakni sebesar 39%. Untuk lebih jelasnya perihal GNP per kapita dan peningkatan angka SER di beberapa negara kawasan Asia dan Amerika Serikat dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1.
GNP Per Kapita Pendidikan Tinggi
Di Beberapa Negara Asia dan Amerika

No.	Negara	GNP Per Kapita US \$ (1992)	Tahun	SER Pendidikan Tinggi
1.	Indonesia	670	1995 1989	1 7
2.	Singapura	15.730	1970 1989	7 -
3.	Malaysia	2.790	1970 1988	4 7
4.	Thailand	1.840	1979 1988	11 -
5.	Philipina	770	1970 1988	20 28
6.	Korea Selatan	6.790	1975 1989	10 39
7.	Amerika Serikat	23.240	1970 1988	50 60
8.	Jepang	28.190	1970 1988	17 30

Sumber: GNP dari The Word Bank (1994)

SER dar Fetgus dan Widyawati (1994), Jones (1994)

Catatan : Nilai SER dapat lebih besar dari 100% karena adanya murid yang terdaftar pada suatu jenjang pendidikan yang umurnya diluar interval kelompok usia jenjang pendidikan tersebut.

Menyimak data pada tabel 1 tersebut mengisyaratkan bahwa makin meningkatnya angkat SER di perguruan tinggi menunjukkan meningkatnya permintaan pendidikan yang lebih tinggi dan makin lamanya seorang berada di bangku sekolah. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat membiayai pendidikan dan makin canggih ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan yang kian modern, masyarakat membutuhkan pendidikan yang lebih berkualitas dan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar dewasa ini.

STRATEGI

Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia menghadapi tanggung jawab dan misi yang rumit dan kompleks, apalagi jika dikaitkan dengan harapan-harapan yang dibebankan kepada PT oleh Pembangunan Nasional Indonesia. Pada PJPT II fokus pembangunan SDM mengkait seiring dengan pembangunan ekonomi, dimana pembangunan SDM mengkait secara langsung dengan pendidikan, khususnya dengan misi dan tanggung jawab PT. SDM yang berkualitas dan profesional merupakan tumpuan dan harapan bangsa, namun kenyataannya menunjukkan bahwa tenaga terdidik perguruan tinggi menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan karena daya serap ekonomi terhadap tenaga terdidik amat terbatas. Respon PT seharusnya tidak hanya melalui berbagai kebijakan pada tingkat nasional tapi justru yang amat penting dan strategis adalah pada PT itu sendiri (Gaffar, 1995: 25).

Agar sesuatu kebijakan (pendidikan) dapat berhasil dengan baik, maka perlu dibuat model. Untuk merancang suatu model kebijakan yang baik, maka model tersebut harus mampu menjawab beberapa pertanyaan berikut (Quade, 1984: 154).

1. Dapatkah model tersebut menggambarkan secara benar dan jelas fakta dan situasi yang diketahui?
2. Ketika parameter-parameter pokok didalam model tersebut bervariasi. Apakah hasilnya tetap konsisten ?
3. Pada kasus-kasus yang bersifat khusus, apakah model tersebut tetap dapat ditangani meskipun hasilnya akan memunculkan berbagai indikasi ?

4. Dapatkah model tersebut menentukan terjadinya sebab-sebab dari berbagai efek yang ditimbulkan ?

Dengan berpegang secara konsisten kepada “empat batas “ tersebut, maka *policy maker* akan mampu mengembangkan suatu model kebijakan dan strategi secara baik, yang pada gilirannya akan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Barangkali pertanyaan kunci yang dilontarkan adalah: Apa misi Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia dalam menghadapi perubahan yang amat cepat ini ? strategi yang bagaimanakah yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi menyosong era globalisasi ?

Kiprah PT di Indonesia haruslah difokuskan kepada optimalisasi kontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas SDM, pengembangan Iptek secara pengembangan kultur identitas bangsa. PT harus tampil sebagai *leader* dan pengembangan *civilization* bangsa, sehingga menjadi andalan seluruh bangsa. Kondisi ini meletakkan PT sebagai titik strategis pembangunan nasional yang harus tumbuh dan berkembang. Misi PT yang dikemas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi memang memerlukan kaji ulang sehingga mampu berperan lebih bermakna dalam pembangunan bangsa dan negara pada umumnya serta mampu meningkatkan kualitas secara signifikan pada khususnya.

Secara global kebijakan yang dapat ditempuh PT dalam upaya untuk meningkatkan kualitas SDM memiliki tiga dimensi utama (Gaffar, 1995: 27), yakni : (1) kebijakan pada tingkat kelembagaan, (2) kebijakan pada tingkat nasional yang menyangkut keseluruhan PT, dan (3) kebijakan yang bersifat global yang bersifat global yang menyangkut internasional.

Pertama, kebijakan kelembagaan dititikberatkan kepada upaya peningkatan kemampuan manajemen kelembagaan sehingga efisiensi dan efektivitas serta kualitas PT mampu mencapai standar yang bersifat universal bagi setiap PT. Kemampuan instruksional yang tinggi dapat meletakkan masing-masing PT untuk memberikan daya respon yang tajam dan kuat terhadap berbagai tuntutan pembangunan nasional, terutama dalam konteks pengembangan SDM dan Iptek.

Kedua, kebijakan makro pada tingkat nasional menitikberatkan kepada perwujudan misi nasional, terutama kaitannya dengan misi PT untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional dari berbagai sudut pandang (dimensi).

Ketiga, kebijakan global dititik beratkan pada perwujudan PT sebagai institusi yang memimpin dan memegang kendali (*leader*) dalam perkembangan Iptek dan pengembangan SDM. Kebijakan global ini bertumpu dari kebijakan nasional yang mengkaitkan fungsi PT sebagai faktor strategis dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan. Interaksi antara berbagai aspek dengan PT hendaknya merupakan suatu proses yang wajar (*natural*) dan merupakan dinamika PT dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Komunikasi internasional antar PT dunia, kerjasama yang bersifat antar PT di berbagai negara merupakan fungsi global PT. pertukaran ketenagaan (terutama staf akademis), mahasiswa, karya ilmiah, dna program dalam berbagai aspek manajemen PT merupakan suatu keharusan yang dapat meletakkan PT sebagai faktor yang berkontribusi dalam percaturan masyarakat intelektual dunia. Kebijakan ini tidak hanya meletakkan PT dalam kapasitas peran internasional namun juga sebagai lambang kemajuan bangsa dalam meningkatkan SDM menyosong era globalisasi dimata masyarakat dunia.

Secara lebih operasional, kebijakan PT dalam menyosong era globalisasi paling tidak harus menitik beratkan kepada empat prioritas utama (Gaffar, 1995: 29-30), yakni : *pertama*, meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen institusional total dalam meningkatkan kualitas manajemen PT secara keseluruhan. *Kedua*, mengembangkan budaya mutu *quality culture* dikalangan civitas akademika. *Ketiga*, meningkatkan keterkaitan dengan berbagai sektor pembangunan nasional dalam arti mengembangkan peran dan fungsi PT dalam konteks pembangunan SDM Indonesia. *Keempat*, mengembangkan fungsi-fungsi global dalam arti meningkatkan pelaksanaan fungsi universal PT yang mengembangkan Iptek dan SDM.

PT harus mampu memposisikan dirinya untuk mengambil prakarsa dalam peran global dalam konteks komunikasi, kerjasama internasional terutama PT dari berbagai negara. Pendeknya, PT dimasa mendatang senantiasa dituntut untuk mampu tampil sebagai *leader* yang mengintegrasikan tiga kecenderungan, yakni: aspirasi masyarakat lokal, kepentingan nasional, dan fungsi global untuk mewujudkan visinya menjadi realitas yang dapat dijadikan lambang kebanggaan bangsa.

Untuk mengkonkretkan atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut, maka diperlukan pengembangan strategi operasional yang memerlukan perangkat Organisasi dan Manajemen (O & M) yang canggih, yang memiliki orientasi dan pendekatan yang sama sekali berbeda dengan O & M tradisional sebagaimana kita praktekkan selama ini. Konsekuensi logis dari hal itu, adalah diperlukannya perubahan pandangan, orientasi, pendekatan, cara berpikir dan perilaku baru yang bersifat sistematis, holistik dan mendasar. Untuk itu maka perlu diterapkan berbagai strategi (Gaffar, 29-30), berikut :

- *Strategi pertama:* melaksanakan perubahan mendasar manajemen lembaga secara sistematis, total dan mendasar dengan sasaran utama perubahan orientasi, pandangan, cara berpikir, dan pola perilaku nyata atau *action* sebagai manifestasi adanya perubahan orientasi dan pandangan serta cara berpikir tersebut.
- *Strategi kedua:* mutu penelitian, dan mutu pengabdian kepada masyarakat. Dalam strategi ini, diharapkan dapat dikembangkan *quality culture* yang secara bertahap dapat menjadi kebiasaan dalam proses pembelajaran.
- *Strategi ketiga :* meningkatkan kesesuaian dan kesepadanan PT dengan berbagai kebutuhan dan tuntutan yang berkembang baik dari sistem pendidikan maupun dari dunia bisnis dan industri yang ada di masyarakat, sehingga sasaran operasionalnya semakin luas dan lebar.
- *Strategi keempat:* meningkatkan peran internasional (global) baik dengan berbagai lembaga PT di negara lain maupun dengan badan-badan atau organisasi internasional yang termasuk *governmental* dan *non governmental agencies*. Strategi ini membuka peluang terjadinya pertukaran informasi, pengalaman, penelitian, karya ilmiah, ketenagaan, mahasiswa dan juga penyegaran keilmuan dan teknologi yang berkembang di perguruan tinggi.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dalam era globalisasi, batasan antara negara satu dengan lainnya, dan bahkan antara budaya yang satu dengan yang lainnya sebagai implikasinya, adalah semakin kabur. Hal ini membuat hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya semakin *intens* dan transparan, yang pada

gilirannya akan berakibat secara langsung terhadap terjadinya persaingan global yang semakin *rigid* di hampir semua aspek kehidupan. Meski era globalisasi mengharuskan kita untuk meningkatkan kualitas SDM, sehingga mampu berperan secara aktif dan produktif, dan tidak hanya sekedar *the loser*.

Salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas SDM, adalah dengan memprioritaskan bidang pendidikan semua jenjang. Dalam konteks ini, perguruan tinggi sebagai institusi yang mengemban visi dan misi untuk meningkatkan SDM memegang peranan yang amat inti dan strategis. Konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa PT harus mampu melaksanakan serta memusatkan secara berhasil perihal visi dan misi tersebut, sehingga kondisi kualitas SDM dapat meningkat signifikan seiring dengan tuntutan dan perkembangan jaman.

Untuk meng-*goalkan*-kan visi dan misi tersebut, maka sangat diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang mumpuni, terstandar, dan bersifat komprehensif. Agar kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan tersebut dapat direalisasikan secara baik, maka dipersyaratkan adanya strategi-strategi yang cerdas, yang mampu mengakomodasikan prakarsa-prakarsa pada tingkat lokal, kepentingan nasional, serta fungsi global. Pendeknya kebijakan dan strategi tersebut harus mampu menetapkan PT sebagai *leader* dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM yang pada gilirannya akan mampu meletakkan bangsa dalam kapasitas peran internasional memasuki era globalisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- H. Mohammad Fakry Gaffar. 1995. "*Visi: Suatu Inovasi dalam Proses Manajemen Antar Perguruan Tinggi*", *Mimbar Pendidikan*. Bandung: Unversy Press IKIP Bandung, hal. 22-30.
- Nachrowi D. Nachrowi. 1995. "*Transisi Pendidikan: Suatu Pemikiran Awal dengan Indonesia sebagai Latar Belakang*". *Transisi Demografi, Transisi Pendidikan dan Transisi Kesehatan di Indonesia* (Penyunting Utama Aris Ananta), Jakarta, Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- Quade, Edward S, 1984. *Analysis for Public Decision 2nd edition*. New York, Elsevier Science Publishing Co., Inc.
- Wardman Djoyonegoro. 1995. *Visi dan Strategi Pembangunan Pendidikan untuk Tahun 2020 Tuntunan Terhadap Kualitas*". *Mimbar Pendidikan*. Bandung: University Press IKIP Bandung, hal. 4-21.